

## Mudahkan Akses Keuangan di Wilayah Terpencil Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah



*Sumber gambar :*

<https://i0.wp.com/kaltimedia.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-02-at-13.57.45-scaled-1.jpeg?resize=1024%2C683&ssl=1>

Pembentukan TPAKD<sup>i</sup> menjadi langkah strategi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat kita, Bumi Benuo Taka terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang terjangkau, dapat merasakan manfaat dari perkembangan sektor keuangan.

**PENAJAM** - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) menggelar pengukuhan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan audiensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur, di aula lantai III Kantor Bupati PPU.

Dalam sambutannya Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan pembangunan daerah khususnya wilayah Kabupaten PPU yang terus dilakukan secara berkelanjutan, memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui akses keuangan yang memadai.

“Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten PPU menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa masyarakat kita, Bumi Benuo Taka

terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang terjangkau, dapat merasakan manfaat dari perkembangan sektor keuangan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa TPAKD Kabupaten PPU, nantinya akan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan, menyederhanakan prosedur, mengoptimalkan sumber daya.

“Meningkatkan edukasi keuangan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak,” sambungnya.

Selaku Pj Bupati PPU Makmur Marbun berharap tim TPAKD ini dapat bekerja dengan komitmen tinggi, melakukan kolaborasi yang sinergis, serta berinovasi dalam mencari solusi-solusi efektif.

“Semoga kerja keras kita semua akan membawa hasil yang positif dan bermanfaat bagi daerah dan masyarakat PPU,” jelasnya.

Turut hadir Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Koordinator OJK seluruh Kalimantan, Deputy Direktur Pengawasan PEPK OJK Kaltim-Kaltara, Sekretaris Daerah PPU, Direktur Kredit PT. BPD Kaltim-Kaltara, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kaltim, dan lainnya. **(Advertorial/taa)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Mudahkan Akses Keuangan di Wilayah Terpencil Pemkab PPU Bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, 4/9/2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 114 Nomor 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres 114/2020), jangkauan layanan keuangan adalah penyediaan jasa/layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum dapat mengakses layanan keuangan formal melalui penyediaan titik akses layanan keuangan, inovasi layanan keuangan, maupun infrastruktur pendukung, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal sesuai dengan kebutuhannya.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b Perpres 114/2020, SNKI sebagai sarana untuk menyinergikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait di Indonesia.
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/>. TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.